

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab sebelumnya, sudah dijabarkan tentang hasil penelitian, paparan data, dan data temuan berdasarkan wawancara, dokumen, dan observasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul. Tayipnasis (112) analisis adalah proses mengetahui informasi yang dikumpulkan. Analisis termasuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang didukung data tersebut, seberapa banyak ia mendukung dan tidak mendukung kesimpulan.

Tujuan analisis adalah membuat singkatan dari data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai dasar yang tentatif untuk keputusan. Analisis data berikut menggunakan metode deskriptif kualitatif (pemaparan). Selanjutnya dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang relevan dengan temuan tersebut.

5.1 Dampak Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Carol H Weiss (1972:4) menyatakan tujuan dan lingkup analisis evaluasi adalah : *“To measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming. The effect emphasizes the outcomes of the program, rather than its efficiecy, honesty, morale, or adherence to rule or standars. The comparison of effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well the program is doing”* yang artinya “Untuk mengukur efek dari suatu program terhadap tujuan yang ditetapkan untuk dicapai sebagai sarana untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan selanjutnya tentang program dan meningkatkan pemrograman masa depan.

Efeknya menekankan hasil program, bukan keefektifan, kejujuran, moral, atau kepatuhannya pada aturan atau standar. Perbandingan efek dengan tujuan menekankan pada penggunaan kriteria eksplisit untuk menilai seberapa baik program berjalan ". Dari pengertian tersebut, Weiss menegaskan bahwa tujuan analisis evaluasi lebih pada pengukuran efek dan dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat, dibanding pengukuran atas efisiensi, kejujuran pelaksanaan, dan lain-lain yang terkait dengan standar-standar pelaksanaan.

Menurut John Owen, *output* adalah produk atau hasil langsung dari kegiatan program. Sedangkan *Outcome* adalah manfaat yang diterima sasaran program selama atau setelah keterlibatan mereka dengan program. Sedangkan *impact* atau dampak merupakan efek jangka panjang yang diterima oleh masyarakat atau sasaran program itu sendiri. Program bisa dikatakan berhasil jika memberikan dampak atau kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Dunn dalam Wibawa (1994:5) dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. *Output* adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari suatu kebijakan. Evaluasi Kebijakan dilakukan untuk menilai apakah program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah layak untuk dilanjutkan dan memberikan efek jangka panjang yang bermanfaat bagi kehidupan yang dituju (sasaran).

Untuk mengetahui dampak dari program, dilakukan melalui identifikasi dampak yang diharapkan dengan dampak yang nyata yang timbul. Dampak yang diharapkan merupakan bentuk nyata dari tujuan program.

Tujuan pelaksanaan Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sendiri sebagaimana tertuang dasar hukum pelaksanaan yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam materi sosialisasi, sehingga akan terwujud masyarakat yang memahami nilai-nilai luhur bangsa, memahami aturan konstitusi, dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta

memahami arti kebhinnekaan yang dapat menjadi kekuatan dan perekat dalam mempersatukan bangsa dan negara sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional.

Selain itu, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis, sejahtera, dan bermartabat sesuai amanah konstitusi. Dampak nyata program akan diidentifikasi melalui dampak terhadap unit sosial (Wibawa, 1994:53-59), yaitu dampak individu, dampak organisasional, dampak lembaga dan sistem sosial. Berikut identifikasi dampak Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur:

5.1.1 Dampak individu

Dampak terhadap individu melibatkan aspek psikis, lingkungan, ekonomi, sosial dan personal. Berdasarkan wawancara dengan para informan, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar hanya menyentuh individu secara psikis dan personal. Secara personal, umumnya masyarakat Kecamatan Gunung Sindur menerima kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di wilayah mereka. Hal itu diperlihatkan dengan respon-respon positif terhadap kehadiran narasumber yang tak lain anggota DPR RI yang mereka pilih. Institusi pendidikan yang dilibatkan seperti sekolah dan pesantren juga tidak keberatan turut ambil bagian dalam kegiatan ini baik sebagai fasilitator atau dalam bentuk kerjasama dari aspek lainnya.

Dari sisi psikis, ada perubahan kesadaran terhadap nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Dimana awalnya hanya ingat sekadar nama Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, namun ketika mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kesadaran bertambah dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya belum ada tolak ukur untuk membandingkan sejauh mana tingkat kesadaran antara satu informan dengan informan lain. Hal ini berbanding lurus dengan seberapa banyak materi yang disampaikan terserap dalam ingatan mereka.

Umumnya, para informan hanya mengikuti satu kali kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dalam satu periode jabatan Anggota DPR RI karena peserta yang hadir diupayakan belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Jadi sejak mengikuti sosialisasi hingga tahun-tahun berikutnya kesadaran yang tergugah itu apakah akan mengendap lama atau malah menghilang tidak diketahui. Namun dari beberapa informan diketahui mereka masih mengingat materi Empat Pilar walaupun kegiatan itu diikuti beberapa tahun sebelumnya. Dalam disiplin ilmu psikologi, proses mengingat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor individu yaitu proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, motivasi yang kuat, memiliki metode tertentu dalam pengamatan dan pembelajaran serta memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik. Faktor inilah yang sangat subjektif sehingga sulit dilakukan pengukuran secara kualitatif karena minat dan motivasi setiap individu itu berbeda.
2. Faktor sesuatu yang harus diingat adalah sesuatu yang memiliki organisasi dan struktur jelas, mempunyai arti, mempunyai keterkaitan dengan individu, mempunyai intensitas rangsang yang cukup kuat. Berdasarkan faktor tersebut seharusnya masyarakat tidak lupa dengan materi Empat Pilar MPR RI karena Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika wacana yang seringkali didengungkan terutama melalui media massa. Sejak di tingkat sekolah dasar, materi-materi tersebut sudah ditanamkan melalui P4, kegiatan upacara bendera, dan masuk sebagai kurikulum dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun interval mendapatkan materi-materi Empat Pilar mungkin berlangsung sangat lama sehingga ada banyak hal yang bisa mengganggu ingatan tersebut tetap terjaga.
3. Faktor lingkungan. Proses mengingat akan lebih efektif apabila ada lingkungan yang menunjang dan terhindar dari adanya gangguan-gangguan. Lingkungan seperti institusi pendidikan atau pemerintahan mungkin akan membantu ingatan tentang Empat Pilar tetap terjaga. Tapi untuk lingkungan di luar itu kecil kemungkinan ingatan seorang individu terhadap Empat Pilar akan terjaga dengan utuh.

5.1.2 Dampak Organisasi

Partai Politik merupakan instrument yang berperan penting dalam setiap kegiatan Anggota DPR di daerah pemilihan. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar berdampak langsung maupun tidak langsung bagi parpol sebagai “kendaraan” para anggota DPR RI dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Dampak langsung Kehadiran Partai Politik di tengah masyarakat yaitu partai telah menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi seperti dijabarkan dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) yaitu:

- a. Partai sebagai tempat pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bagian dari pendidikan politik di masyarakat. Melalui kegiatan ini parpol menjadi sarana sosialisasi politik dimana Damsar (2010:153) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik. Menurut Richard E Dawson sosialisasi politik merupakan pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang baru menginjak dewasa.

Berdasarkan definisi tersebut maka bisa dijabarkan tujuan sosialisasi politik antara lain untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah politik yang berkembang, untuk meningkatkan kualitas individu dalam berpolitik, dan meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa.

Proses sosialisasi politik membuat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Para peserta Sosialisasi Empat Pilar sudah memainkan

peran politiknya sejak awal mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Warga mendapatkan pengetahuan tentang gejala-gejala atau fenomena politik melalui materi-materi yang disampaikan. Berdasarkan wawancara, kualitas kesadaran dalam memahami nilai-nilai kebangsaan melalui Empat Pilar bertambah melalui kegiatan ini. Harapannya, warga bisa menjadi agen sosialisasi dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara untuk mewujudkan cita-cita bersama membangun bangsa yang sesuai dengan dasar dasar negara dan tujuan konstitusi.

- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tujuan dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar. Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat sekaligus representasi dari parpol salah satu wewenangnya adalah memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI sebagai salah satu cara untuk menangkis berbagai isu yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Di sinilah peran penting partai politik dituntut untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal memberikan kontribusi untuk meredakan masalah-masalah tersebut. Salah satunya melalui sosialisasi politik sehat dalam bentuk apapun, bisa program atau bentuk kampanye politik damai sehingga keberadaan partai politik mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat. Sekaligus memberikan bukti persaingan sehat meski ada perbedaan pandangan.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Partai politik berfungsi sebagai agen kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan memberikan ruang pada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi terkait kebijakan agar sampai pada pemerintah. Sebaliknya, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini partai politik berperan menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Jika fungsi ini pincang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan partai politik

untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Meskipun pada praktiknya, sudah menjadi rahasia umum, kepentingan para elite partai cukup berperan dalam setiap kebijakan pemerintah. Idealnya, partai politik di negara demokrasi membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak membawa kesejahteraan pada rakyat. Sebab bisa jadi ada kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan keputusan maupun kebijakan sehingga kontrol dari partai politik itu perlu untuk meminimalisir kebijakan yang merugikan rakyat. Selanjutnya partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia

Seerti disinggung sebelumnya, partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat memiliki andil dalam proses mempengaruhi kebijakan tersebut karena tugas partai politik lah menerima dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan yang merugikan rakyat. Seharusnya partai politik melindungi kepentingan rakyat dengan berpihak pada setiap kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Menghargai setiap aspirasi mutlak dilakukan dalam sebuah negara demokrasi, seperti aspirasi yang disampaikan dalam forum diskusi seperti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Berdasarkan wawancara dengan para informan, meski tema besar tentang Empat Pilar MPR RI, peserta diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi tentang apapun. Kemudian aspirasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pembahasan di DPR RI bersama dengan anggota DPR lainnya dengan mekanisme tertentu. Tidak hanya itu, aspirasi yang disampaikan saat demonstrasi untuk memprotes kebijakan pemerintah pun seharusnya mendapat tempat yang sama. Saat itulah, keberpihakan partai politik diuji, apakah mengutamakan kepentingan rakyat atau golongan.

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terakhir, partai politik tempat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang kelak membangun Indonesia. Kaderisasi menjadi hal paling penting untuk partai untuk menjaring individu-individu potensial yang bisa berkontribusi positif dalam iklim politik bangsa. Parpol menjadi wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Kesempatan kaderisasi ini muncul bisa muncul dari kehadiran partai politik di tengah masyarakat. Membuka kesempatan pada kader-kader muda di daerah untuk ikut dalam membangun negara melalui partai politik.

Dampak secara langsung menaikkan elektabilitas Anggota DPR RI bersangkutan. Elektabilitas merupakan serapan dari bahasan Inggris “electability” yang artinya keterpilihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektabilitas didefinisikan sebagai kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki jabatan dalam pemerintahan. Densy Sugiono (2008) mendefinisikan elektabilitas adalah ketertarikan seseorang dalam memilih.

Elektabilitas dikaitkan dengan tingkat keterpilihan partai politik oleh masyarakat dalam pemilihan umum. Kriteria elektabilitas ini antara lain dikenal baik oleh masyarakat atau populer. Popularitas adalah tingkat keterkenalan seseorang, dan merupakan modal yang sangat penting untuk mendapat perhatian publik. Makin tinggi tingkat popularitas seseorang maka akan semakin gerdongkrak elektabilitasnya. Contohnya seorang Primus Yustisio, kehadirannya sangat ditunggu di tengah masyarakat karena namanya sudah populer di layar televisi sejak dulu. Sehingga besar kemungkinan elektabilitasnya akan ikut terdongrak apalagi jika didukung oleh kinerja yang baik, dan memiliki rekam jejak yang positif.

5.1.3 Dampak Masyarakat

a. Membangun Kesadaran Secara Komunal

Secara statistik, MPR DPR RI melakukan survei untuk mengetahui dampak sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Buku Laporan Kinerja MPR (2018:43) menunjukkan hasil survei 90% responden menyatakan persetujuannya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat final. Dimana 99,5% diantaranya menganggap setiap warga negara wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan wajib mengamalkan nilai-nilainya. Sebanyak 91,2% responden menganggap bahwa saat ini nilai-nilai Pancasila masih dilaksanakan oleh warga negara setidaknya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain level pemahaman, hasil survei mencari tahu perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Hasilnya, 65,1% mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan.

Survei tersebut bersifat nasional, dan tidak hanya mensurvei kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan tapi juga untuk sosialisasi dengan metode lainnya. Jadi, jika mengerucutkan pada metode sosialisasi dapil, khususnya untuk Kecamatan Gunung Sindur secara luas belum diketahui secara statistik kecuali ada penelitian lebih lanjut untuk mengetahuinya. Jika bicara tentang asumsi, wilayah Gunung Sindur beberapa kali dikunjungi oleh Anggota DPR RI untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar maka ada sejumlah warga yang sudah mendapatkan materi Empat Pilar. Hal ini jelas sedikit banyak akan memberikan efek positif karena ada sejumlah warga yang tergugah kesadarannya terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi jika melibatkan institusi pendidikan seperti SMU atau pesantren yang notabene peserta kegiatan adalah siswa yang cukup potensial dalam menerima sebuah materi baru, sekaligus bisa menjadi agen sosialisasi yang bisa menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar pada lingkungan terdekat. Sayangnya, ruang ini tidak ada tindak lanjut dari Anggota DPR RI maupun MPR secara kelembagaan dalam bentuk program yang

berkelanjutan atau sekadar pengawasan.

b. Meningkatkan kesadaran Politik.

Wawasan masyarakat akan kontribusi mereka dalam system politik Indonesia akan bertambah. Mereka memiliki peran yang cukup strategis dalam membantu penyeberluasan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Sedikit banyak, informasi yang mereka dapatkan akan mengubah pola pikir masyarakat yang akan berpengaruh pada sistem politik di masyarakat.

5.1.4 Dampak Lembaga

Sasaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar adalah masyarakat terlepas dari metode sosialisasi yang diterapkan. Pada dasarnya setiap kegiatan MPR RI yang melibatkan masyarakat berdampak pada MPR secara kelembagaan, antara lain:

a. Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab MPR

Salah satu tugas dan wewenang MPR adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 5 yang menyebutkan :”menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”. Hal ini sejalan dengan visi MPR seperti disebutkan dalam Buku Laporan Kinerja MPR (2018:71) MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, dimana MPR merupakan representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan politik kebangsaan. Ada penekanan pada aspirasi masyarakat dan daerah tersebut perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional. Aspirasi yang berkembang idealnya dapat dibahas dalam tataran politis sehingga memperkaya bahan pertimbangan para pengambil keputusan. Proses penyerapan aspirasi bagaimanapun bentuknya perlu mendapat ruang dalam setiap kebijakan.

Buku Laporan MPR RI (2018:72) penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan dalam upaya peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga pemusyawaratan rakyat serta implementasi pelaksanaan kewajiban anggota MPR sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain untuk memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerapan aspirasi dilakukan oleh Anggota MPR yang diselenggarakan di daerah, baik secara individu maupun berkelompok untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang terkait langsung dengan bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan wewenang MPR baik dilakukan di daerah pemilihan maupun di daerah sesuai dengan penugasan kelembagaan. Penyerapan aspirasi di daerah pemilihan salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Dalam kegiatan ini Anggota DPR membuka ruang aspirasi pada masyarakat yang diwakili oleh para peserta sosialisasi. Penyerapan aspirasi tersebut sebagai bukti bahwa Anggota DPR RI bersangkutan layak mendapatkan kepercayaan masyarakat yang sudah memberikan hak suara mereka saat pemilu legislatif.

b. Membentuk Citra Positif DPR/MPR RI

Masyarakat umumnya hanya melihat kinerja MPR RI dari media. Tak sedikit pemberitaan media menggiring MPR pada citra negatif akibat maraknya kasus korupsi, atau isu pembuatan undang-undang yang mengundang kontroversi. Melalui kegiatan tatap muka dengan konstituen Anggota DPR RI bisa membangun citra positif dengan menginformasikan kinerja MPR. Seperti yang dikatakan oleh seorang narasumber, wawasan mereka tentang pola kerja MPR menjadi bertambah berkat informasi yang disampaikan oleh Anggota DPR RI dalam kegiatan sosialisasi Empat Pilar. Setiap kegiatan yang melibatkan konstituen seharusnya menjadi kesempatan bagi Anggota DPR RI untuk menanamkan *mindset* positif sebuah lembaga negara. Hal ini bisa menjadi penyeimbang pemberitaan-pemberitaan media yang mungkin menggiring opini buruk terhadap keberadaan lembaga perwakilan rakyat.

5.2 Evaluasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gunung Sindur

5.2.1 Efektifitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang menjadi peserta kegiatan, mayoritas mereka mengatakan sebelumnya tidak mengetahui program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Maka dengan mengikuti kegiatan tersebut para informan mengatakan kegiatan tersebut cukup efektif untuk mengingatkan mereka pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun tingkat efektifitas kegiatan masih rendah karena belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Indikatornya terletak pada kemampuan program yang hanya berperan sebagai katalisator tapi tidak menjadi jaminan bertambahnya tingkat pemahaman masyarakat. Ketertarikan masyarakat hanya sebatas saat berlangsungnya kegiatan Empat Pilar. Efektifitas di sini hanya mampu bertahan dalam jangka pendek. Ini menjadi catatan yang perlu dipertimbangkan oleh para kebijakan agar efektifitas program bisa bertahan dalam jangka panjang di masyarakat.

Seperti yang disampaikan salah satu informan bawa efektifitas itu sulit diukur. Sebab umumnya *output* kebijakan pemerintah tidak berwujud sehingga sulit diukur secara kuantitas. Jadi, untuk mengukur efektifitas dari peningkatan mutu sebuah program dan hanya bisa disampaikan dalam bentuk pernyataan bukan angka.

Sebaliknya, untuk Anggota DPR RI efektifitasnya bisa tinggi secara politis. Mereka punya “panggung” untuk mentransfer nilai-nilai politik mereka pada masyarakat. Karena pada dasarnya setiap program dari MPR RI, dalam bentuk apapun akan memberikan keuntungan pada Anggota DPR RI karena akan bertatap

muka dengan konstituen. Walaupun hal tersebut tergantung dari kondusifitas acara, yang didukung sarana pra sarana yang memadai, waktu pelaksanaan, fasilitas, penyampaian materi oleh narasumber, dan profesionalitas panitia dalam mengemas acara.

Arthur G. Gedeian, dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* mengartikan efektifitas; *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* yang artinya Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektifitas. (Gedeian, 1991:61). Jika dikaitkan dengan teori tersebut maka ukuran efektifitas Sosialisasi Empat Pilar di dapil masih rendah karena belum mencapai tujuan-tujuan maksimal yang diharapkan. Hanya bisa diukur untuk jangka pendek yaitu sebagai pengingat, namun untuk mengukur tingkat pemahaman masih butuh proses. Maka perlu skema jangka panjang agar masyarakat bisa mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi sehingga tingkat efektifitas juga ikut meningkat.

Tabel 5.1

Efektifitas Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur

Efektifitas				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil Analisis
1. Para informan mengatakan kegiatan cukup efektif untuk mengingatkan terhadap materi Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bagi Anggota DPR RI	Berdasarkan pengamatan para peserta menjadi tahu istilah Empat Pilar karena sebelumnya mereka hanya sekedar tahu tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.	Survey secara nasional dalam pemahaman materi, sebanyak 70,3% menyatakan materi Sosialisasi Empat Pilar mudah dipahami, bahkan 7,2% diantaranya menganggap sangat mudah. Sisanya sebanyak 29,7% menolak anggapan bahwa materi yang	Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektifitas. (Gedeian:1991)	1. Efektifitas masih rendah sekedar mengingatkan tentang materi Empat Pilar belum pada tahap pemahaman secara komprehensif. 2. Efektifitas juga sulit diukur karena umumnya <i>output</i> dari program pemerintah tidak berwujud.

kegiatan Sosialisasi Empat Pilar cukup efektif karena bisa bertemu dengan konstituen di dapil.		disampaikan mudah untuk dipahami.		Perlu penelitian jangka panjang untuk mengukur tingkat efektifitas. 3. Narasumber yang kompeten menjadi salah satu indikator efektif atau tidaknya kegiatan.
--	--	-----------------------------------	--	---

5.2.2 Efisiensi dalam Pelaksanaan

Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Bagaimana dengan efisiensi Program Sosialisasi Empat Pilar di dapil? Untuk memaparkan soal efisiensi ini akan diuraikan dalam beberapa aspek, efisiensi waktu, efisien sumber daya manusia, dan efisien biaya. Efisiensi waktu, untuk penyampaian materi Empat Pilar yang cukup banyak waktu yang disediakan sekitar 2-3 jam sepertinya kurang efisien. Meskipun ada buku-buku materi pendukung, namun untuk mencapai tingkat pemahaman seperti yang diharapkan tidak akan pernah cukup.

Aspek kedua, efisiensi sumber daya manusia yaitu tim penyelenggara dan peserta. Kegiatan ini melibatkan orang-orang yang memiliki akses dengan Anggota DPR RI yang akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar baik panitia maupun anggota. Berdasarkan wawancara, setiap anggota dewan punya cara yang berbeda dalam memberdayakan sumber daya manusia di sekitarnya namun mereka memanfaatkan dengan baik kekuatan sumber daya manusia di sekitar mereka.

Dari perbandingan dua anggota dewan ditemukan, ada yang melibatkan kader partai di DPD, ada yang merekrut tim dari masyarakat yang pernah jadi tim sukses. Melalui jalur-jalur tersebut mereka bekerjasama dengan warga di kantong-kantong kemenangan untuk penyelenggaraan sosialisasi Empat Pilar. Entah memanfaatkan kedekatan atau hal lainnya sehingga kegiatan Sosialisasi Empat Pilar bisa dilaksanakan dengan meminjam fasilitas sekolah atau pekarangan milik warga.

Pemilihan peserta pun tidak sulit, jika bekerjasama dengan institusi pendidikan maka peserta berasal dari siswa, jika tidak maka melibatkan kader partai dan warga sekitar. Hal ini didukung oleh teori sekolah sebagai agen sosialisasi. Menurut Saptono (2017:115) seperti halnya keluarga, “sekolah memperoleh mandat tegas untuk mensosialisasikan nilai dan norma kebudayaan bangsa dan negaranya. Oleh karena itulah di sekolah berlangsung proses pendidikan dan pengajaran.

Melalui proses pendidikan, anak-anak diperkenalkan pada nilai dan norma atau budaya masyarakat, bangsa dan negaranya, sehingga diharapkan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu amat bermanfaat bagi pengembangan kepribadian anak sebagai individu dan sekaligus sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara. Sekolah sesungguhnya menyediakan sarana untuk terbentuknya kelompok teman sebaya.

”Pemilihan lembaga pendidikan sebagai lokasi kegiatan menambah nilai efisiensi program karena panitia tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih dalam menyiapkan kegiatan. Hal itu sejalan dengan pernyataan Mahmudi dalam Halim dan Kusufi ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output* (Halim & Kusufi, 2014 : 129).

Dari aspek pembiayaan, efisiensi anggaran bersifat subjektif. Informan ketujuh misalnya menyiratkan anggaran yang diberikan oleh DPR tidak selalu mencukupi untuk membiayai kegiatan sosialisasi. Perihal kewenangan anggaran merupakan tugas dari Badan Anggaran, atas persetujuan pemerintah.

Dalam hal ini, informan bukan anggota Badan Anggaran sehingga tidak terlibat langsung dalam pembuatan anggaran kegiatan. Informan keenam punya persepsi berbeda tentang pembiayaan. Anggaran yang diberikan dirasa cukup asalkan peserta terfasilitasi dengan baik. Pembiayaan juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi peserta. Pernyataan ini didukung oleh informan kedelapan yang mengatakan pihaknya akan memaksimalkan penggunaan dana yang sudah dianggarkan oleh MPR RI.

Tabel 5.2

Efisiensi Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur

Efisiensi				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil analisis
1. Panitia menyediakan fasilitas sesuai dengan pagu anggaran. 2. Umumnya peserta mengaku terfasilitasi oleh panitia. 3. Pemberian uang transport menyesuaikan dengan keadaan. 4. Penggunaan dana diserahkan pada tim kerja.	1. Kegiatan di luar ruangan panitia menyediakan tenda dan kursi. 2. Kegiatan luar ruang umumnya tidak menggunakan fasilitas layar tayang. 3. Memanfaatkan fasilitas milik warga untuk pelaksanaan kegiatan.	Rincian dana anggaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dari MPR RI sebesar Rp 37 juta untuk honor narasumber, moderator, panitia teknis, konsumsi untuk 160 orang bantuan tempat pelaksanaan, publikasi kegiatan, undangan, dan transport peserta.	Mahmudi (Halim & Kusufi: 2014) ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan	1. Efisiensi waktu: Waktu yang digunakan kurang efisien jika dibandingkan materi yang disampaikan 2. Efisiensi sumber daya manusia: Panitia memanfaatkan sumber daya seluruh sumber daya untuk membantu pelaksanaan kegiatan. 3. Efisiensi biaya bersifat subjektif karena anggaran sudah menjadi aturan yang baku.

5.2.3 Kecukupan Terhadap Kebutuhan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Konsep Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di dapil sudah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka di parlemen dan menyampaikan aspirasi. Sosialisasi di dapil satu-satunya pilihan yang memungkinkan legislatif bisa lebih dekat dengan masyarakat. Secara psikologis, peserta juga memiliki kedekatan dengan anggota DPR RI yang biasanya juga didaulat menjadi narasumber. Sehingga masyarakat tak segan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan tersebut. Artinya, kegiatan sosialisasi di dapil ibarat sekali mengayuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Jika pun ini dijadikan ajang kampanye atau “menunggangi” kegiatan sosialisasi tidak bisa terelakan karena kegiatan sosialisasi berada di daerah pemilihan yang notabene pesertanya kemungkinan besar adalah konstituen. Kekurangannya memang tatap muka ini sangat terbatas tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Winarno (2002: 186) tentang Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tabel 5.3
Kecukupan Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur

Kecukupan				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil Analisis
<p>1. Metode seminar sangat diterima oleh peserta kegiatan karena bisa berinteraksi langsung dengan anggota DPR RI yang mereka pilih.</p> <p>2. Masyarakat senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota dewan.</p>	<p>Observasi di Kampung Pakis pada salah satu narasumber 35 persen materi yang disampaikan seputar isu-isu terkini dan kehidupan pribadi. Selanjutnya sekitar setengah jam ada sesi tanya jawab, yang disambut para peserta dengan antusias. Pertanyaan yang muncul tidak hanya seputar materi Empat Pilar tapi juga banyak tentang kehidupan pribadi. Primus juga menyambut baik pertanyaan-pertanyaan meski menyangkut pertanyaan pribadi.</p>	<p>Berdasarkan popularitas secara nasional, Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan menempati posisi ketiga dengan persentase 16,3% dengan keterlibatan sebanyak 28,6%. Popularitas tertinggi yaitu televisi sebanyak 24%, metode seminar memiliki prosentasi paling tinggi kedua yaitu 20,6 persen,</p>	<p>Winarno (2002: 186) tentang Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.</p>	<p>Konsep Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di dapil sudah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertemu dengan wakil mereka di parlemen dan menyampaikan aspirasi.</p>

5.2.4 Perataan Program

Berdasarkan hasil wawancara belum ada perataan program Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur. Bisa dilihat dari proses perekrutan peserta yang mayoritas mungkin memiliki akses lebih terbuka dengan anggota DPR bersangkutan. Seperti dikatakan beberapa informan, salah satunya anggota DPR dari Fraksi PKS yang menyerahkan penentuan lokasi dan peserta kegiatan pada DPD Partai.

Para peserta yang dipilih sebagian besar adalah kader, simpatisan, atau timses, sementara sisanya adalah masyarakat umum yang mungkin direkomendasikan oleh para kader. Informan lain yang bertugas sebagai panitia juga mengatakan kegiatan mayoritas di daerah-daerah lumbung suara. Hingga kemungkinan besar penjangkaran peserta kegiatan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan anggota DPR RI atau tim suksesnya.

Teori yang relevan dengan kedekatan masyarakat dan kekuasaan, Sahid (2010-202) kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya.

Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003: 437). Selain itu, penelitian ini juga tidak bisa memastikan perataan lokasi penelitian. Sebagai informasi, di dapil v ada 9 anggota DPR, berarti seharusnya ada 180 kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dalam satu periode jika setiap anggota DPR patuh melakukan kegiatan 5 kali dalam setahun. Jika 180 kegiatan itu terbagi dengan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, kemungkinan besar tingkat perataan ini akan tinggi asal tidak terjadi tumpang tindih.

Sayangnya, seperti dikatakan informan kedelapan, MPR belum memiliki database sebaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di dapil untuk mengetahui titik mana saja yang sudah mendapatkan program tersebut atau belum. Hal ini sesuai dengan temuan penulis dalam penelitian ini, dimana satu tempat yang sama didatangi oleh dua anggota dewan yaitu yang berlokasi dekat dengan kantor Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur yang pernah didatangi oleh Primus Yustisio dari Fraksi PAN dan Bachtiar Aly dan Fraksi Nasdem. Selain itu juga di SMA Nurul Falah Desa Cibadug Kecamatan Gunung Sindur didatangi oleh TB Soemandjaya dari Fraksi PKS dan Primus Yustisio dari Fraksi PAN.

Walaupun untuk menambal kurangnya partisipasi masyarakat, MPR RI memiliki beragam metode sosialisasi yang bersifat *segmented*. Tapi belum ada jaminan adanya pemerataan program ke seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran (Herlina, 2009). Dalam melaksanakan suatu kebijakan, keadilan harus menjadi dasar utamanya, dalam arti semua sektor serta semua lapisan masyarakat yang menjadi sasaran dan objek kebijakan harus sama-sama dapat merasakan hasil dari kebijakan tersebut (Lukman, 2015).

Tabel 5.4

Perataan Sosialisasi Empat Pilar di Gunung Sindur

Perataan				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil Analisis
1. Kegiatan yang bekerjasama dengan institusi pendidikan umumnya melibatkan siswa sebagai peserta.	Peserta yang hadir dalam kegiatan Empat Pilar di Kampung Pakis Desa Rawakalong mayoritas adalah ibu rumah tangga karena kegiatan dilakukan di	Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Anggota DPR terus menerus melakukan Sosialisasi Empat Pilar di	Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien,	1. Pemerataan program belum terjadi di semua daerah, salah satunya karena perekrutan peserta lebih terbuka pada masyarakat yang memiliki akses lebih dekat pada tim atau anggota DPR RI terkait.
2. Peserta yang terlibat ada				

<p>juga kader parpol, dan warga yang memiliki akses kedekatan dengan tim sukses atau anggota DPR RI.</p> <p>3. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dilakukan di kantung-kantung suara pemilu legislatif.</p>	<p>pagi hari sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Pada waktu tersebut, umumnya para kepala rumah tangga sedang bekerja.</p>	<p>daerah pemilihannya masing-masing. 19.528 melibatkan 2.958.200 orang</p>	<p>dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran (Herlina, 2009).</p>	<p>2. MPR belum memiliki database sebaran kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di dapil untuk mengetahui titik mana saja yang sudah mendapatkan program tersebut atau belum sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih kegiatan di daerah yang sama bisa dihindari. Sekaligus bisa mengetahui daerah yang belum tersentuh program tersebut.</p>
---	---	---	---	---

5.2.5 Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003: 437). Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun tidak akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, dalam hal ini peserta dan penyelenggara. Ada hal menarik mengenai respon para peserta. Beberapa peserta mengaku lebih antusias untuk mengikuti sosialisasi Empat Pilar karena ada figur Primus Yustisio sebagai mantan artis. Padahal Primus terbilang sudah jarang terlihat di layar televisi. Hal ini menunjukkan politik popularitas masih berlaku untuk menarik perhatian masyarakat. Ini juga berarti rasa ingin tahu masyarakat terhadap Sosialisasi Empat Pilar tidak begitu besar. Selain karena popularitas figur narasumber, para informan rata-rata ikut serta karena memang diwajibkan sekolah, atau bagian dari institusi penyelenggara sehingga mereka tidak punya pilihan selain untuk mengikuti kegiatan ini.

Sangat disayangkan tidak ada rekrutmen terbuka untuk para peserta walaupun akan riskan karena dikhawatirkan jumlahnya akan tidak terbendung. Apalagi jika diketahui ada uang *transport* bagi peserta. Sehingga tidak bisa diketahui sejauh mana kesadaran masyarakat umum untuk mengikuti atau ingin tahu tentang apa itu Empat Pilar. Tapi di sisi lain, kegiatan ini seolah menjadi gambaran betapa masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mereka pilih untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya untuk tatap muka, tapi ada wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sekalipun sudah ada kegiatan reses, tapi sepertinya apapun kegiatannya, asal ada anggota DPR di sana, maka aspirasi apapun akan disampaikan. Secara umum, program yang melibatkan keberadaan anggota DPR di masyarakat sangat dibutuhkan. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan hanya salah satu bagian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Teori yang relevan untuk dengan kebutuhan masyarakat tersebut berkaitan dengan teori aspirasi. Menurut Amirudin (2003:3) secara defenitif merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Definisi lain, aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam porses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian.

Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan Bener (Bank Dunia dalam Salman 2005:3).

Tabel 5.5

Responsivitas Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur

Responsivitas				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil Analisis
1.Motivasi peserta untuk mengikuti sosialisasi Empat Pilar berbeda-beda dari mulai diwajibkan atau karena undangan. 2.Elektabilitas narasumber juga menjadi salah satu faktor pendorog untuk mengikuti kegiatan Empat Pilar.	Pengamatan di Kampung Pakis Desa Rawakalong dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Anggota DPR RI Fraksi PAN Primus Yustisio respon warga sangat antuasias. Masyarakat sempat riuh mengabadikan kedatangan Primus ke kampong mereka apalagi saat itu ditemani	Belum ditemukan dalam dokumen tentang respon terhadap Empat Pilar apakah menjawab kebutuhan masyarakat.	Aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam porses	1. Program yang melibatkan keberadaan anggota DPR di masyarakat sangat dibutuhkan. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan hanya salah satu bagian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Masyarakat butuh wakil rakyat yang bisa duduk bersama untuk menyampaika n aspirasi. 3. Popularitas narasumber

	oleh istrinya yang juga berprofesi sebagai artis.		pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan Bener (Bank Dunia dalam Salman 2005:3).	menjadi salah satu pendorong antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar.
--	---	--	--	--

5.2.6. Ketepatan Program

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok-kelompok sasaran perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat.

Terkait dengan penelitian ini, ketepatan dalam Program Sosialisasi Empat Pilar akan diukur dengan membandingkan antara tataran ideal dengan kenyataan dari beberapa indikator, yaitu kepuasan partisipan, dan kondisi sosial dan politik. Indikator kepuasan partisipan, dari hasil wawancara dengan para informan hampir semua sepakat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sudah tepat diselenggarakan. Meskipun secara dampak tidak terlalu signifikan baik untuk individu dan masyarakat tapi ada peran penting untuk tetap mengingatkan masyarakat terhadap

Empat Pilar negara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sisi kondisi sosial politik tampaknya belum ada korelasi yang tajam antara kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terutama di dapil dalam upaya mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang tertulis dalam tujuan penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sebab kondisi sosial dan perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir cukup memprihatinkan dengan banyaknya isu-isu SARA dan pertikaian politik yang masih belum usai.

Program ini seolah belum bisa memberikan manfaat optimal dalam mewujudkan tujuan tersebut. Apa perlu MPR RI melakukan pemutakhiran program agar bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial politik kekinian? Perlu juga sinergitas antara lembaga-kembaga negara pusat maupun daerah agar program Sosialisasi Empat Pilar ini lebih tepat sasaran untuk jangka waktu panjang, dan mmebantu memecahkan amslah-masalah sosiopolitik di Indonesia.

Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain (Lukman, 2015).

Table 5.6

Ketepatan Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Gunung Sindur

Ketepatan				
Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Teori Yang relevan	Hasil Analisis
Para informan menilai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sudah tepat dilakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat	Saat observasi, narasumber menjelaskan materi-materi Empat Pilar dengan kerukunan umat beragama. Penyampainya materi sangat relevan ntuk umat beragama	Survey nasional menyebutkan setelah mereka mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, ditemukan 61,1% mengaku mereka	Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat	Berdasarkan Indikator kepuasan partisipan men dari hasil wawancara dengan para informan hampir semua sepakat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar sudah tepat

tentang nilai-nilai kebangsaan.	dan kondisi kekinian.	mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan.	sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah yang lain (Lukman, 2015).	diselenggarakan. Meskipun secara dampak tidak terlalu signifikan baik untuk individu dan masyarakat tapi ada peran penting untuk tetap mengingatkan masyarakat terhadap Empat Pilar negara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
---------------------------------	-----------------------	---	--	---